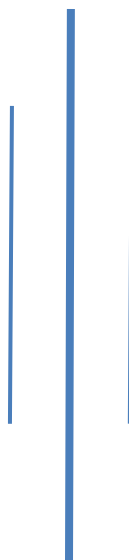




LAPORAN KINERJA (LK)



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TA 2017





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja (LK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mengelola kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja DPPKB Tahun 2017 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2017. Semoga Laporan Kinerja ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



H. MUHAMMAD SUIB, S.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19690906 199412 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LK) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Labuhanbatu Utara selama Tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 5 (Lima) adalah empat (4) dari lima sasaran tersebut dengan kategori kinerja sangat berhasil dan satu (1) sasaran dengan kategori kinerja berhasil. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Sasaran	Hasil Capaian Kinerja	Kategori
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Serta Sarana dan Prasarana di DPPKB	88,88	Sangat Berhasil
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	90,5	Sangat Berhasil
Tersedianya Alat Kontrasepsi Yang Efektif dan Berdaya Tanggap	78,82	Berhasil



Meningkatkan Peran Serta Kelompok/Tokoh Masyarakat Serta tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	88,15	Sangat Berhasil
Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK RM)	90	Sangat Berhasil

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian hasil kinerja DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 secara keseluruhan dapat dicapai dengan sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program/kegiatan pada sasaran strategis yang belum memenuhi harapan yang ditetapkan sehingga diharapkan ditahun-tahun berikutnya bisa lebih ditingkatkan.

Sementara itu, capaian akuntabilitas keuangan DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun 2017 juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp. 3.323,794,184,00 atau 92,72% dari anggaran sebesar Rp.3.584,725,800,00 dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.2,892,065,574,00 atau 90,79% dari anggaran sebesar Rp. 3,185,276,536,00.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. MAKSUD DAN TUJUAN LK.....	6
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS BKBPPA (RENSTRA BKBPPA)	8
B. VISI DAN MISI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	9
C. TUJUAN DAN SASARAN	10
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017	13
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	23
BAB IV. PENUTUP.....	25
A. KESIMPULAN.....	25
B. SARAN.....	26



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Misi, Tujuan DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	11
Tabel 2.2 Misi, Tujuan dan SasaranJumlah DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara	11
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020	12
Tabel 3.1 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Serta Sarana dan Prasarana Di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	17
Tabel 3.2 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk.....	19
Tabel 3.3 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Alat Kontrasepsi Yang Efektif Dan Berdaya Tanggap.....	20
Tabel.3.4 Hasil Capaian Kinerja sasaran Meningkatkan Peran Serta Kelompok/Tokoh Masyarakat Serta Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera.....	21
Tabel.3.5 Hasil Capaian Kinerja Sasaran 3.5 Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK RM).	22

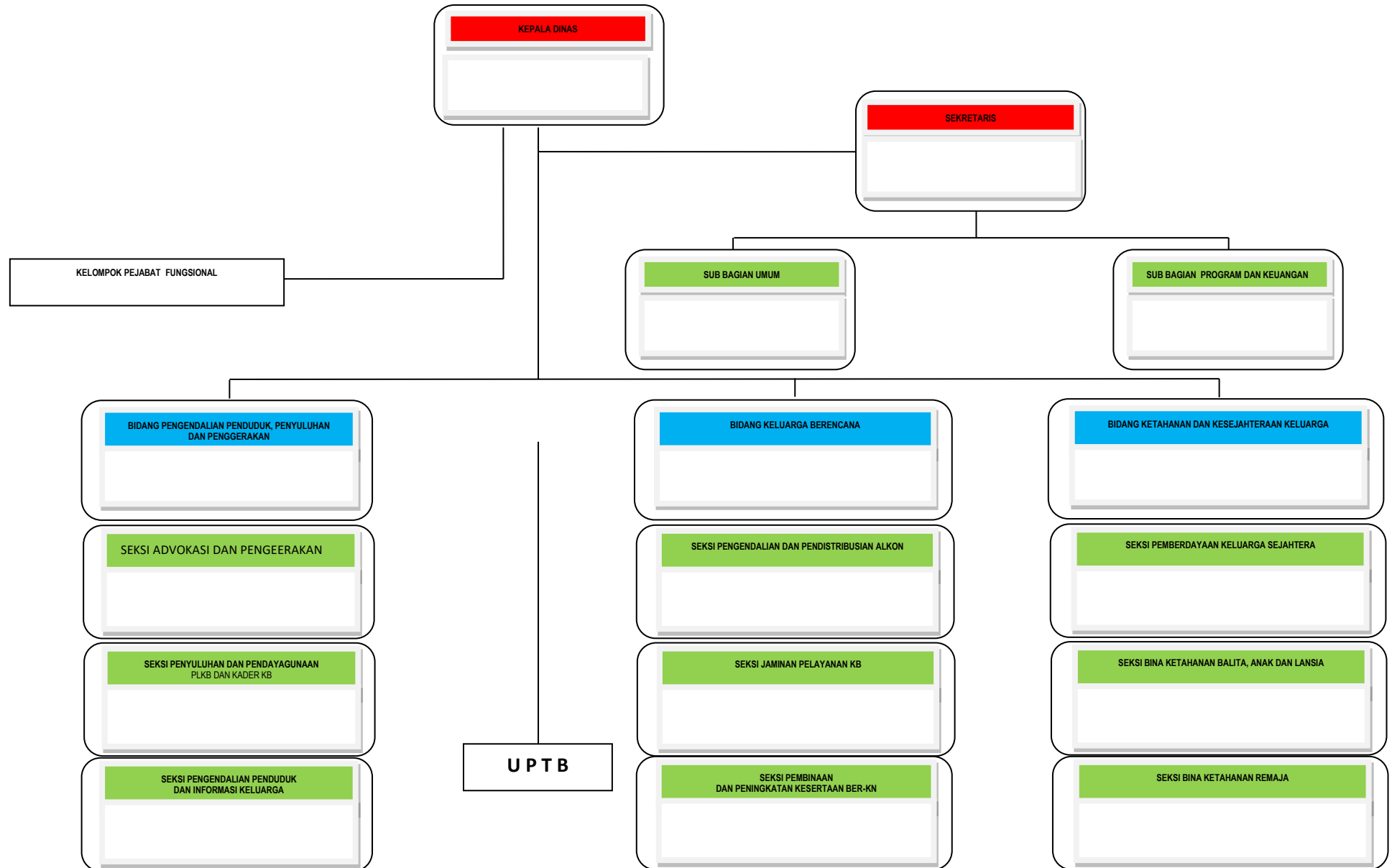


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	5
---	---

Gambar 1.1 Susunan Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah ditetapkan, demikian pula dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah SKPD yang dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan menyangkut bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai pengemban amanah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara berkewajiban menyusun Laporan Kerja (LK), sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan yang ditemui dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini adalah dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai penetapan kinerja tahun 2017 yang telah disepakati. Sementara itu, landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;



6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 17 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 5 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Labuhanbatu Utara mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian, perumusan, penyusunan dan penetapan program kerja badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penyiapan kebijakan operasional dan kebijakan teknis pelaksana tugas sesuai dengan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;.
- c. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Memberikan dukungan terhadap pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana.



- e. Pembinaan terhadap Koordinator dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- f. Penyelenggaraan dan sinkronisasi pengelolaan Keluarga Berencana Kabupaten dengan Nasional;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- h. Pemberian Laporan Pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 1 (satu) Orang Kepala Dinas dibawah 1 (satu) orang Sekretaris dengan 3 (tiga) orang Kepala Bidang yang dibawah 3 (tiga) orang Kepala Subbidang.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mendukung tugas dan fungsinya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas : Muhammad Suib,S.Pd
- b. Sekretaris : Jamaluddin,S.Ag,M.AP
- c. Kabid Keluarga Berencana : Ngadri
- d. Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : Erni Malinda Napitupulu, SKM
- e. Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan : Hasyim,SE
- b. Sekretariat terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB
 - 3) Sub Bidang Pengendalian dan Pendistribusian Alkon
- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja
 - 2) Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga Balita,Anak dan Lansia
 - 3) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera



e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan terdiri dari ;

- 1) Sub Bidang Advokasi dan Pergerakan
- 2) Sub Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- 3) Sub Bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

Dalam proses pengelolaan Keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara ditangani oleh pejabat pengelola Keuangan yang terdiri dari :

➤ Pengguna Anggaran	: 1 orang
➤ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	: 3 orang
➤ Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	: 1 orang
➤ Pejabat Pembuat Komitmen	: 1 orang
➤ Bendahara Pengeluaran	: 1 orang
➤ Pengurus Barang	: 1 orang
➤ Penyimpan Barang	: 1 orang
➤ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	: 1 orang
➤ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	: 3 orang

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara selengkapnya diilustrasikan sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini.



D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah untuk :

1. Sebagai bahan Evaluasi dan Analisis Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Sebagai tolak ukur keberhasilan segala kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Mendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara agar dapat lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kata Pengantar (Ikhtisar)
Menjelaskan secara ringkas tentang dasar Pembuatan Laporan Kinerja (LK) serta sasaran dan harapan yang hendak dicapai dari hasil evaluasi kinerja tahun 2017
2. BAB I : Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum, struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja dan sistematika penyajian.
3. BAB II : Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kerja
Menjelaskan secara ringkas tentang Renstra DPPKB, Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Utara, tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama serta penetapan kinerja tahun 2017.



4. BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara serta akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan selama tahun 2017.

5. BAB IV : Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017 dan mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem laporan kinerja, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan strategis baik Internal maupun Eksternal merupakan langkah yang sangat penting dan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi misi serta strategis instansi pemerintah. Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang realitis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalan. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju kesana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/ sasaran berupa program dan kegiatan.



B. VISI DAN MISI

B.1 VISI

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Pernyataan visi haruslah realistis, artinya bahwa visi harus didasarkan pada realita dan bukanlah buah pikiran yang berandai-andai agar dapat menjadi suatu komitmen yang bisa diraih. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas PPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara pada masa mendatang diarahkan untuk membangun peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Lembaga Layanan Publik dengan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”.

Penjelasan dari Visi di atas adalah:

- Penduduk tumbuh seimbang adalah pertumbuhan penduduk yang seimbang dari segi kuantitas maupun kualitas, yang ditandai dengan menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), menurunnya angka kelahiran total (TFR) pada Wanita Usia Subur 15-40 tahun, meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) akseptor KB, menurunnya tingkat *drop out* dalam ber-KB, serta terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

B.2. MISI

Visi perlu diwujudkan dengan suatu tindakan nyata yang dinyatakan melalui misi. Misi akan membantu lebih jelas penggambaran visi yang akan dicapai serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara. Misi sangat penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.. Rumusan misi dalam dokumen renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kekuatan,



kelemahan, peluang dan tantangan pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi penggunaan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah :

1. Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur;
2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk;
3. Menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera;

Penjelasan dari Misi di atas adalah:

- Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran.
- Menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera adalah upaya menciptakan suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

C. TUJUAN DAN SASARAN

C.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing visi dan misi.



Tabel. 2.1 Misi, Tujuan
DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020

MISI	TUJUAN
1. Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur	1.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan DPPKB Kab.Labuhanbatu Utara
2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk	1. Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang
	2.Meningkatkan pelayanan dan jumlah akseptor Keluarga Berencana
3. Menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	1.Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera
	2.Meningkatkan peran serta Remaja tentang informasi penyiapan Kehidupan keluarga bagi remaja dan pendewasaan usia perkawinan.

C.2. SASARAN

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel.2.2. Misi, Tujuan, Sasaran
DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan sistem operasional perkantoran yang sistematis dan teratur	1.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan DPPKB Kab.Labuhanbatu Utara	1.1.Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara
MISI	TUJUAN	SASARAN
2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk	1.Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang	2.1.Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
	2.Meningkatkan pelayanan dan jumlah akseptor Keluarga Berencana	2.2.Tersedianya alat kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap
3. Menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	1.Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	3.1.Meningkatkan peran serta kelompok/tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam mewujudkan keluarga sejahtera
	2.Meningkatkan Peran serta Remaja tentang informasi penyiapan berkehidupan keluarga bagi remaja dan pendewasaan usia perkawinan.	3.2 Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK RM).



D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020.

**Tabel.2.3. Indikator Kinerja Utama
DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana di DPPKB	1. Persentase layanan administrasi yang tertangani. 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran 3. Jumlah pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu. 4. Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1. Jumlah desa yang dilaksanakan pemutaran film KB 2. Rata-rata jumlah anak per keluarga 3. Jumlah kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) kelompok UPPKS serta PPKS yang aktif dan berkembang
3. Tersedianya Alat Kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap	1. Rasio Akseptor KB 2. Persentase Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
4. Meningkatkan peran serta kelompok/tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam mewujudkan keluarga sejahtera	1. Cakupan institusi/ masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 2. Jumlah kader/mitra sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan 3. Persentase peningkatan pengetahuan PLKB/Institusi
5. Meningkatkan peran serta remaja tentang informasi penyiapan berkehidupan bagi remaja dan pendewasaan usia perkawinan	4. Jumlah Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR



E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dituangkan dalam suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja.

Adapun Kinerja secara ringkas dapat dijelaskan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan berbasis kinerja, yaitu hasil-hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Labuhanbatu Utara telah mencapai tujuan atau sasarannya, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017. Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 1.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 dengan realisasinya. Rumus pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori
1.	Capaian \geq 100%	Memuaskan
2.	$85\% \leq \text{capaian} < 100\%$	Sangat Berhasil
3.	$70\% \leq \text{capaian} < 85\%$	Berhasil
4.	$55\% \leq \text{capaian} < 70\%$	Cukup Berhasil
5.	Capaian \leq 55%	Kurang Berhasil

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.



A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis tentang empat misi berikut tujuh sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

Misi 1 “Mewujudkan Sistem Operasional Perkantoran Yang Sistematis Dan Teratur”
Sasaran 1.1 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana Di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan hasil pengukuran, hasil pencapaian kinerja sasaran Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Serta Sarana dan Prasarana Di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara

INDIKATOR	TAHUN 2016 BKBPPPA		DPPKB TAHUN 2017		CAPAIAN
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	(%)
1 Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	97%	100%	96,07%	96
2 Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	88%	100%	93,13%	93
3 Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dan Pakaian Olah Raga	130 Stell	130 Stell	40 Stell	40 Stell	100
4 Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	83%	100%	64,38%	64
5 Jumlah Laporan Akhir Tahun, LAKIP serta Laporan Keuangan Semesteran	18 Set	18 Set	6 Set	0 Set	00
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					88,88



Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Serta Sarana dan Prasarana di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil capaian kinerja indikator persentase layanan administrasi yang tertangani pada tahun 2017 adalah sebesar 96% dengan nilai skala pengukuran sangat berhasil. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 97%, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 96%, maka realisasi indikator kinerja mengalami sedikit penurunan sebesar 1%, hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur yang mana BKBPPPA berubah menjadi 2 (Dua) Instansi OPD yaitu DPPPA dan DPPKB.
2. Hasil capaian kinerja indikator persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran pada tahun 2017 adalah sebesar 93% dengan nilai skala pengukuran sangat berhasil. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 88%, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 93%, maka realisasi indikator kinerja mengalami kenaikan sebesar 5%.
3. Hasil capaian kinerja indikator jumlah pengadaan Pakaian Dinas Harian, Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dengan nilai skala pengukuran memuaskan Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 130 stel, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 40 stel, maka realisasi indikator kinerja mengalami Penurunan sebesar 90 stel, hal ini dikarenakan adanya perubahan Nomenklatur yang mana BKBPPPA berubah menjadi 2 (Dua) Instansi OPD yaitu DPPPA dan DPPKB .
4. Hasil capaian kinerja indikator persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2017 adalah sebesar 64% dengan nilai skala pengukuran cukup berhasil. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 83%, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 64%, maka realisasi indikator kinerja mengalami penurunan sebesar 24%, karena adanya perubahan Nomenklatur dan terbatasnya anggaran .
5. Hasil capaian kinerja indikator jumlah Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun pada tahun 2017 adalah sebesar 0% dengan nilai skala pengukuran kurang berhasil indikator kinerja pada tahun 2017 adalah sebesar 6 set, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 sebesar 18 set, maka realisasi indikator kinerja mengalami penurunan dikarenakan perubahan Nomenklatur.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja sasaran Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Serta Sarana dan Prasarana di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara menunjukkan angka rata-rata sebesar 88,88% dengan skala pengukuran sangat berhasil. Capaian kinerja sasaran tersebut dicapai melalui beberapa program sebagai berikut:



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Misi 2 “Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk”
Sasaran 2.1 Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil pengukuran, hasil pencapaian kinerja sasaran Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

INDIKATOR	TAHUN 2016 BKBPPPA		TAHUN 2017 DPPKB		CAPAIAN
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	(%)
1 Jumlah desa yang dilaksanakan pemutaran film KB	50 Desa	22 Desa	13 Desa	13 Desa	100
2 Pencanaan Kampung KB	1 Desa	1 Desa	8 Desa	8 Desa	100
3 Rata-rata jumlah anak per keluarga	3 Orang	3,5 Orang	3 Orang	3,2 Orang	106,67
4 Jumlah kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL), kelompok UPPKS serta PPKS yang aktif dan berkembang	108 Kel	107 Kel	200 Kel	113 Kel	56,5
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					90,5

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil capaian kinerja indikator jumlah desa yang dilaksanakan pemutaran film KB pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dengan nilai skala pengukuran memuaskan. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 22 desa, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 13 desa, maka realisasi indikator kinerja mengalami penurunan sebesar 9 desa.
2. Hasil capaian kinerja sasaran indikator jumlah Desa yang dilaksanakan Pencanaan Kampung KB pada tahun 2017 adalah sebesar 100%dengan skala pengukuran memuaskan,realisasi indicator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 1 desa, apabila dibandingkan dengan realisasi indicator kinerja pada tahun 2017 sebesar 8 Desa,maka realisasi indikator kinerja mengalami kenaikan sebesar 7 desa.
3. Hasil capaian kinerja indikator rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2017 adalah sebesar 106,67% dengan nilai skala pengukuran sangat berhasil. Realisasi indikator



kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 3,5 orang, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 3,2 orang, maka realisasi indikator kinerja mengalami kenaikan sebesar 0,3 orang.

4. Hasil capaian kinerja indikator jumlah kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL), kelompok UPPKS serta PPKS yang aktif dan berkembang pada tahun 2017 adalah sebesar 56,05% dengan nilai skala cukup berhasil. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 adalah sebesar 113 kelompok, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 sebesar 107 kelompok, maka realisasi indikator kinerja mengalami kenaikan sebesar 6 kelompok.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja sasaran Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan angka rata-rata sebesar 90,5 % dengan skala sangat berhasil. Capaian sasaran tersebut dicapai melalui Program Keluarga Berencana.

Misi 2 “Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk”
Sasaran 2.2 Tersedianya Alat Kontrasepsi Yang Efektif Dan Berdaya Tanggap

Berdasarkan hasil pengukuran, hasil pencapaian kinerja sasaran Tersedianya Alat Kontrasepsi Yang Efektif dan Berdaya Tanggap pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Alat Kontrasepsi Yang Efektif Dan Berdaya Tanggap

INDIKATOR	TAHUN 2016 BKBPPPA		TAHUN 2017 DPPKB		CAPAIAN
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	(%)
1 Rasio Akseptor KB	85%	81,61%	100%	82,56,%	82,56
2 Persentase Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	77%	74,07%	100%	75,09%	75,09
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					78,82

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Alat Kontrasepsi Yang Efektif dan Berdaya Tanggap dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil capaian kinerja indikator rasio akseptor KB pada tahun 2017 adalah sebesar 82,56% dengan nilai skala pengukuran sangat berhasil. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 82,56%, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 81,61%, maka realisasi indikator kinerja mengalami kenaikan sebesar 0,95%.
2. Hasil capaian kinerja indikator persentase Cakupan Peserta KB Aktif (CPR) pada tahun 2017 adalah sebesar 75,09% dengan nilai skala pengukuran berhasil. Realisasi indikator



kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 74,07%, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 75,09%, maka realisasi indikator kinerja mengalami kenaikan sebesar 1,02%.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja sasaran Tersedianya Alat Kontrasepsi Yang Efektif Dan Berdaya Tanggap menunjukkan angka rata-rata sebesar 78,82% dengan skala pengukuran berhasil. Capaian sasaran tersebut dicapai melalui Program Pelayanan Kontrasepsi.

Misi 3 “Menciptakan Keluarga Kecil, Bahagia Dan Sejahtera”
Sasaran 3.1 Meningkatkan Peran Serta Kelompok/Tokoh Masyarakat Serta Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan hasil pengukuran, hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Peran Serta Kelompok/Tokoh Masyarakat Serta Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Peran Serta Kelompok/Tokoh Masyarakat Serta Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera

INDIKATOR	TAHUN 2016		TAHUN 2017		CAPAIAN
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	(%)
1 Cakupan institusi/masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	80%	78%	100%	75%	75
2 Jumlah kader/mitra sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan	608 Orang PPKBD dan Sub PPKBD	608 Orang PPKBD dan Sub PPKBD	650 Orang PPKBD dan Sub PPKBD	650 Orang PPKBD dan Sub PPKBD	100
3 Persentase peningkatan pengetahuan PLKB/Institusi	95%	82%	95%	85%	89,47
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					88,15

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Peran serta Kelompok/Tokoh Masyarakat Serta Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil capaian kinerja indikator cakupan institusi/masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri pada tahun 2017 adalah sebesar 88,15% dengan nilai skala pengukuran sangat berhasil. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 78%, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 75%, maka realisasi indikator kinerja mengalami sedikit penurunan sebesar 3%.
2. Hasil capaian kinerja indikator jumlah kader/mitra sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan pada tahun 2017 adalah sebesar 89,47% dengan nilai skala pengukuran sangat berhasil. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 608 orang PPKBD dan sub PPKBD, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada



tahun 2017 sebesar 650 orang PPKBD dan Sub PPKBD, maka realisasi indikator kinerja mengalami kenaikan sebesar 42 orang PPKBD dan Sub PPKBD sub PPKBD.

3. Hasil capaian kinerja indikator persentase peningkatan pengetahuan PLKB/Institusi pada tahun 2017 adalah sebesar 89,47% dengan nilai skala pengukuran sangat berhasil. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 82%, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 89,47%, maka realisasi indikator kinerja mengalami kenaikan sebesar 7,47%.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja sasaran Meningkatkan Peran Serta Kelompok/Tokoh Masyarakat Serta Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera menunjukkan angka rata-rata sebesar 88,15% dengan skala pengukuran sangat berhasil. Capaian sasaran tersebut dicapai melalui Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

Misi 3 “Menciptakan Keluarga Kecil, Bahagia Dan Sejahtera”
Sasaran 3.2 Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK RM)

Berdasarkan hasil pengukuran, hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Peran Serta Remaja tentang informasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan pendewasaan usia perkawinan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK RM)

INDIKATOR	TAHUN 2016		TAHUN 2017		CAPAIAN
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	(%)
1 Jumlah Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	-	-	60 Kel	54 Kel	90
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					90

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK RM) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil capaian kinerja indikator Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR pada tahun 2017 adalah sebesar 90% dengan nilai skala pengukuran sangat berhasil. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 0%, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 90%, maka realisasi indikator kinerja mengalami kenaikan sebesar 90%, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 belum terbentuknya Pendirian pusat informasi dan konseling KRR.



Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK RM) menunjukkan angka rata-rata sebesar 90% dengan skala pengukuran sangat berhasil. Capaian sasaran tersebut dicapai melalui Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah disebutkan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Anggaran
DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017**

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
I	Belanja Langsung	3.584.725.800	3.323.794.184	92,72
	Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana Di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara	795,481,000	751,720,595	94,49
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	624.900.600	600.325.595	96,07
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	125,030,400	116,520,000	93,19
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.400.000	22.000.000	98,21
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	12,875,000	64,38
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,150,000	0	00
	Sasaran Strategis 2 : Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	2,415,054,800	2,216,161,589	91,76
	Program Keluarga Berencana	2,415,054,800	2,216,161,589	91,76
	Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Alat Kontrasepsi Yang Efektif Dan Berdaya Tanggap	271,000,000	255,622,000	94,33
	Program Pelayanan Kontrasepsi	271,000,000	255,622,000	94,33
	Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Peran Serta Kelompok/Tokoh Masyarakat Serta Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	25,000,000	25,000,000	100
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	25,000,000	25,000,000	100



	Sasaran Strategi 5 : Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK RM)	78,190,000	75,290,000	96,29
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	78,190,000	75,290,000	96,29
Total Anggaran Keseluruhan		3,584,725,800	3,323,794,184	92,72

Sasaran Strategis Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Serta Sarana dan Prasarana di DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara didukung dengan anggaran sebesar Rp 795,481,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 751,720,595,00 atau 94,49%.

Sasaran Strategis Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk didukung dengan anggaran sebesar Rp 2,415,054,800,00 dengan realisasi sebesar Rp.2,216,161,589,00 atau 91,76%.

Sasaran Strategis Tersedianya Alat Kontrasepsi Yang Efektif Dan Berdaya Tanggap didukung dengan anggaran sebesar Rp.271,000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.255,622,000,00 atau 94,33%.

Sasaran Strategis Meningkatkan Peran Serta Kelompok/Tokoh Masyarakat Serta Tokoh Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera didukung dengan anggaran sebesar Rp.25,000,000 dengan realisasi sebesar Rp.25,000,000 atau 100%.

Sasaran Strategis Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK RM) didukung dengan anggara sbesar Rp. 78,190,000 dengan realisasi sebesar Rp. 75,290,000 atau 96,29%

Total Anggaran Belanja Langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 adalah sebesar Rp.3.584.725.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.323.794.184,00 atau 92,72%. Sementara itu, Total Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebesar Rp.3,185,276,536,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.892,065,574,00 atau 90,79%.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 menyajikan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan. Keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2017. Berikut ini beberapa kesimpulan dari pengukuran capaian hasil kinerja DPPKB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017.

1. *Capaian Hasil Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017 secara keseluruhan dapat dicapai dengan sangat baik. Dari Lima (5) sasaran strategis yang telah dirumuskan pada RENSTRA DPPKB Tahun 2015 s/d 2020, Satu (1) dari sasaran tersebut diatas capaian kerjanya masuk dalam kategori memuaskan dan Empat (4) capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori sangat berhasil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program/kegiatan pada sasaran strategis yang belum memenuhi harapan yang ditetapkan sehingga diharapkan di tahun – tahun berikutnya bisa lebih ditingkatkan.*
2. *Capaian Akuntabilitas Keuangan Belanja Langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp.3.323,794,184,00 atau 92,72% dari anggaran sebesar Rp.3.584,725,800,00 sementara untuk Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp.2.2892,065,574,00 atau 90,79% dari anggaran sebesar Rp.3,185,276,536,00.*



SARAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal mempengaruhi hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut beberapa saran untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja DPPKB pada Tahun 2017:

1. Memperbanyak promosi tentang Program KB melalui penyebaran brosur pamflet serta siaran radio;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kaum pasangan usia subur (PUS) agar tidak menunda untuk ber KB;
3. Melibatkan peran serta masyarakat, organisasi, mitra kerja dalam Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Aek Kanopan, Januari 2018

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

H. MUHAMMAD SUIB, S.Pd

PEMBINA TK.I

NIP. 19690906 199412 1 001

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun Anggaran : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana di DPPKB	1. Persentase layanan administrasi yang tertangani. 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran 3. Jumlah pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100% 100% 40 Stell 100% 6 Set
2.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1. Jumlah desa yang dilaksanakan pemutaran film KB 2. Rata-rata jumlah anak per keluarga 3. Jumlah kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL), kelompok UPPKS serta PPKS yang aktif dan berkembang	13 Desa 3 Orang 200 Kel
3.	Tersedianya Alat Kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap	1. Rasio Akseptor KB 2. Persentase Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	100% 100%
4.	Meningkatkan peran serta kelompok/tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam mewujudkan keluarga sejahtera	1. Cakupan institusi/ masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 2. Jumlah kader/mitra sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan 3. Persentase peningkatan pengetahuan PLKB/Institusi	100% 650 Orang PPKBD dan Sub PPKBD 95%
5.	Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK RM)	1. Pendirian Pusat Informasi dan Konseling KRR	60 Kel

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 624,900,600,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 125,030,400,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin	Rp. 22,400,000,00	APBD
4.	Aparatur	Rp. 20,000.000,00	APBD
5.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 3,150,000,00	APBD
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.2,415,054,800,00	APBD dan APBN
7.	Keluarga Berencana	Rp. 271,000,000,00	APBD
8.	Pelayanan Kontrasepsi	Rp. 25,000,000,00	APBD
	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp. 78,190,000,00	APBD
9.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		
	Total Anggaran	Rp.3,584,725,800,00	APBD dan APBN

Aek Kanopan, Januari 2018

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



H. MUHAMMAD SUIB, S.Pd

PEMBINA TK.I

NIP. 19690906 199412 1 001